

SIARAN PERS

Memikirkan Kembali Reformasi Perlindungan Sosial dalam Pemulihan Pascapandemi

Jakarta, 21 April 2022 — Rancangan dan penerapan sistem perlindungan sosial dan jaring pengaman darurat harus disempurnakan dan disesuaikan dengan masyarakat atau negara berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan faktor-faktor lain yang saling bersinggungan yang membentuk kebutuhan, kesempatan, dan hasil (outcomes) dalam masyarakat atau negara tersebut.

Ketika negara mengembangkan strategi pemulihan pascapandemi, program perlindungan sosial yang membantu kelompok termiskin dan paling rentan akan menjadi makin penting. Inovasi, pembelajaran, dan berbagi pengalaman yang berkesinambungan dalam merancang dan menerapkan langkah-langkah perlindungan sosial sangatlah penting dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial untuk pemulihan pascapandemi.

Diselenggarakan oleh The SMERU Research Institute dan The Asian Development Bank Institute (ADBI), webinar terkait Think20 yang dijadwalkan pada 21 April 2022 ini akan mengidentifikasi langkah-langkah penting dan perlu yang harus dipertimbangkan demi reformasi sistem perlindungan sosial dan solusi kebijakan yang komprehensif dan menjawab tantangan utama yang dihadapi negara maju dan berkembang. Webinar ini diharapkan dapat mengembangkan rekomendasi bagi G20 tentang perancangan reformasi perlindungan sosial dalam pemulihan pascapandemi.

Jaring pengaman sosial dalam pemulihan pascapandemi – pengalaman Jepang

Industri hospitality (jasa penyediaan akomodasi serta makan dan minum) terkena dampak paling besar oleh pandemi COVID-19. Lebih dari 60% karyawan dalam industri ini adalah perempuan. Banyak dari mereka merupakan pekerja tidak tetap dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Sementara itu, terdapat peningkatan tenaga kerja di industri digital, tetapi peningkatan tersebut lebih tinggi pada tenaga kerja laki-laki daripada perempuan. Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, penting untuk menciptakan peluang kerja bagi mereka di industri digital dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan perubahan struktural ekonomi serta industri yang muncul bersama digitalisasi. "Kami sekarang berencana mendukung perempuan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, menyediakan pelatihan-pelatihan keterampilan digital bagi perempuan, dan mempromosikan upaya mempekerjakan kembali perempuan serta peralihan karir mereka ke industri digital dengan menawarkan subsidi kepada pemerintah daerah sebagai semacam kebijakan pasar tenaga kerja aktif," kata Tomoko Hayashi (Direktur Jenderal Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Government of Japan).

Perlindungan sosial adalah pilar dukungan penting di Asia Tenggara selama pandemi COVID-19.

COVID-19 telah meningkatkan kesadaran dan permintaan akan perlindungan sosial yang tanggap-guncangan. Antara Maret 2020 dan Mei 2021, perekonomian Asia Tenggara telah merencanakan atau menerapkan 146 langkah perlindungan sosial. Bantuan sosial menyumbang lebih dari 70% respons perlindungan sosial di Asia Tenggara dengan 105 langkah yang diluncurkan oleh 8 negara anggota berkembang yang menjangkau lebih dari 113 juta individu. "Hampir 50% bantuan sosial berbentuk bantuan langsung tunai (BLT), sementara bantuan berbentuk makanan/barang mewakili 17% bantuan sosial. Sementara itu, BLT rata-rata berdurasi 3,3 bulan dan meningkat dua kali lipat di beberapa negara," kata Amir H. Jilani (Spesialis Bidang Sosial, Southeast Asia Department (SERD) , Asian Development Bank (ADB)).

Sistem perlindungan sosial dan program sosial yang adaptif di Indonesia masih bersifat ad hoc dengan dasar hukum yang masih lemah untuk menanggapi krisis pada masa depan.

Upaya-upaya perlindungan sosial di Indonesia masih bersifat ad hoc dengan dasar hukum yang masih lemah untuk menanggapi krisis pada masa depan. Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi warga negara Indonesia dan muncul kekhawatiran tentang imbasnya terhadap kemiskinan. Terlepas dari proyeksi yang dibuat oleh banyak pihak pada awal pandemi, Pemerintah Indonesia berhasil membatasi peningkatan angka kemiskinan. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan mobilisasi sistem perlindungan sosial Indonesia guna mengucurkan bantuan sosial. Namun, dampak COVID-19 masih terasa, terutama bagi kelas menengah dan pekerja.

Pemerintah Indonesia didorong untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dengan membangun basis data kesejahteraan sosial yang andal dan menyiapkan mekanisme pemutakhiran data yang dinamis agar dapat mengikutsertakan masyarakat rentan, seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Terdapat juga kebutuhan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial untuk mengikutsertakan orang-orang yang berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. "Pemerintah perlu memperluas partisipasi warga dan kontribusi skema perlindungan sosial. Inilah yang saya sebut 'safety ropes' [tali pengaman] untuk melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin, tidak hanya mereka yang termasuk dalam kelompok 40% terbawah, tetapi juga mereka yang memiliki risiko jatuh miskin ketika guncangan datang," kata Sudarno Sumarto (Peneliti Utama di The SMERU Research Institute dan Penasihat Kebijakan di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)).

Hal lain yang perlu dilakukan adalah merampingkan peraturan, mengintegrasikan program di seluruh pemerintahan, dan memperjelas struktur pendanaan pemerintah.

Pembuat kebijakan hendaknya berfokus pada skema pensiun sosial untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif dalam lingkup populasi yang menua.

"Pensiun dasar menjadi lebih penting daripada sebelumnya, baik saat ini maupun pada masa depan [...] dan cakupan yang lebih luas menjadi lebih penting daripada sebelumnya," kata John Piggott (Profesor Ilmu

Ekonomi, Direktur Australian Research Council (ARC) Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), University of New South Wales). Tingkat manfaat pensiun sosial pun perlu dinaikkan karena nilai dari iuran dana pensiun yang terus disediakan bagi para pensiunan pun kemungkinan akan turun. Lebih lanjut, perlindungan terhadap inflasi, baik pada tahapan manfaat pertama maupun sepanjang periode pembayaran sangatlah penting.

Menanggapi tantangan dalam bidang pensiun dan pendapatan masa tua, John menyebutkan bahwa mengomunikasikan kemungkinan terjadinya pengurangan akumulasi pendapatan atau manfaat pada masa tua, memfasilitasi masa bekerja yang lebih panjang, dan lebih menekankan pada pensiun prabayar yang akan mengurangi beban utang pada generasi mendatang mungkin menjadi langkah ke depan dalam menyusun kembali kebijakan perlindungan sosial terkait pendapatan masa tua.

"Krisis yang baik tidak boleh disia-siakan, dan saya pikir kita harus sepenuhnya memanfaatkan kesempatan untuk memperluas pensiun sosial sejauh yang dapat diberikan," kata John.

Fleksibilitas struktur pengeluaran fiskal diperlukan dalam menanggapi perubahan keadaan jangka menengah hingga jangka panjang.

Ketika regulasi diperlukan karena penyebaran-kembali COVID-19, biaya regulasi dapat diprediksi melalui metode perhitungan jumlah kompensasi. "Kebijakan dan langkah dukungan berbasis-aturan kami adalah meninjau kebijakan karantina yang fleksibel dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya karantina berdasarkan pemahaman tentang karakteristik COVID-19 dan mempertahankan dukungan yang ditargetkan karena pemulihan COVID-19 yang tidak merata," kata Taesuk Lee (Kepala Unit of Policy Responses to Demographic Changes di Korea Development Institute (KDI)). Reformasi struktural yang komprehensif diperlukan untuk merespons berbagai perubahan lingkungan. Perubahan kebijakan kesejahteraan, pendidikan, militer, pensiun, dan perburuhan perlu dilakukan secepatnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Ratri Indah Septiana
Kepala Bidang Komunikasi
The SMERU Research Institute
rseptiana@smeru.or.id

Seluruh materi presentasi dapat diunduh di <https://smeru.or.id/id/event-id/memikirkan-kembali-reformasi-perlindungan-sosial-dalam-pemulihan-pascapandemi> (hanya tersedia dalam bahasa Inggris).

Tentang The SMERU Research Institute

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di <https://smeru.or.id/>.

Tentang Task Force 5–T20

The SMERU Research Institute adalah host Task Force 5 T20 dengan fokus pada topik ketaksetaraan, sumber daya manusia, dan kesejahteraan. Dengan Asep Suryahadi sebagai lead co-chair, bersama dengan para co-chair lainnya, SMERU akan memimpin pengembangan 17 catatan kebijakan yang akan disusun oleh penulis dari berbagai belahan dunia; merumuskan catatan kebijakan terpadu tentang ketaksetaraan, sumber daya manusia, dan kesejahteraan untuk T20 dan G20; dan menyelenggarakan acara sampingan dalam waktu dekat. Silakan merujuk ke <https://www.t20indonesia.org/tf5/> untuk informasi lebih lanjut tentang TF5 T20.